

RADIKALISASI ISU AGAMA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017

Fariz Mahadhika Putra – 14010115140089

Farizmahadhika26@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si**

nhsardini@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerah. Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2017 lalu.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang radikalisasi isu agama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, terdapat persoalan politik yang menimpa salah satu calon gubernur DKI Jakarta yaitu ahok, yang kemudian memicu rentetan peristiwa lainnya. Permasalahan non-pemilu lebih banyak mewarnai kontestasi politik tersebut. Selain itu, banyak terjadi praktek-praktek kecurangan yang terindikasi memicu munculnya pandangan radikalisme. Penggunaan Isu SARA dan Politisasi identitas menjadi komoditas utama dalam memicu konflik horizontal dimasyarakat. Masifnya isu SARA dan Politisasi Identitas pada saat kampanye mengakibatkan kebuntuan rasional pada masyarakat dalam memilih pemimpin dan menciptakan sikap intoleran dimasyarakat. Alhasil, hal tersebut berdampak masif terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

KATA KUNCI

Pilkada, Radikalisme, Agama, Strategi Politik, Gerakan Sosial

Pendahuluan

Demokrasi didefinisikan Abraham Lincoln sebagai “*kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*”. Dalam paham demokrasi rakyat menjadi pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Sejak awal berdiri, Indonesia memilih paham demokrasi sebagai sistem politik yang bermakna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi yang diwujudkan dengan melaksanakan Pemilu.

Menurut Ramlan Subakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Tujuan pelaksanaan Pemilu selain untuk mengisi jabatan publik kepada daerah, juga sebagai sarana legitimasi dari masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Pemilu menjadi roh dari demokrasi sebab ketika Pemilu berhasil, maka pemerintah mempunyai legitimasi untuk melaksanakan kekuasaannya. Namun, ketika Pemilu itu gagal, maka stabilitas sosial politik negara akan terganggu dan memundurkan demokrasi di negara tersebut. Pada tahun 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pilkada secara serentak. Pilkada serentak tahun 2017 dilaksanakan di 101 daerah salah satunya DKI Jakarta. Pilkada adalah bagian dari proyek demokratisasi di Indonesia sejak tumbangnya rezim orde baru. Keberhasilan atau kegagalan model Pilkada dianggap menjadi salah satu faktor penentu bagaimana kualitas demokrasi dan secara nasional ditentukan oleh bagaimana nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik ditingkat lokal. DKI Jakarta memiliki etnis, agama dan budaya yang beragam, dimana dinamika politik senantiasa memiliki tantangan yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif homogen. Hal tersebut dapat terlihat pada kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang melibatkan simbol-simbol etnisitas seperti suku, ras, dan agama sehingga menimbulkan konflik antar identitas yang masuk ke ranah politik.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pilkada DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam Pilkada yaitu dapat menggelar dua putaran apabila pasangan calon belum meraih 50%+1 suara sah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 khususnya pada putaran kedua menyajikan fenomena politik dengan menguatnya sentimen agama, konservatifisme, isu SARA dan politisasi identitas dari masing-masing pasangan calon yang mana hal tersebut cukup sensitif dalam sejarah politik Indonesia. menguatnya isu agama dan SARA pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu dipicu oleh kasus penistaan agama yang berawal dari pernyataan kontroversi Ahok di Kepulauan Seribu mengenai pembobongan dengan surah Al-Maidah ayat 51. Kasus penistaan agama tersebut menimbulkan beragam tanggapan di berbagai kalangan umat Islam, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif dan diekspresikan secara terbuka maupun tertutup. Masifnya demonstrasi atas nama pembelaan terhadap ayat suci Al-Quran yang dikenal dengan Aksi Bela Islam, 411, 212, dan 112. Sehingga membuat arus aktivisme Islam menjadi salah satu gelombang utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada Pilkada. Gerakan aksi bela Islam yang dilakukan sekelompok umat muslim tersebut merupakan ekspresi yang tidak dapat dibatasi oleh aturan yang ada, karena demokrasi yang dilakukan termasuk dalam nilai demokrasi, namun disisi lain ekspresi politik itu bahkan masuk dalam nuansa SARA. Maraknya penggunaan kampanye bersentimen agama menyebabkan konflik horizontal dimasyarakat dimana menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah. Pemikiran ini merupakan dasar dari pemikiran radikalisme.

Pilkada DKI Jakarta banyak diwarnai dengan meningkatnya aksi intoleransi melalui mobilitas identitas keagamaan demi kepentingan politik. Masifnya sentimen agama dan konservatifisme pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu menciptakan nuansa politik yang mengindikasikan adanya paham radikalisme dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Pada dasarnya paham radikalisme dapat digerakan dalam segala momentum, yang dimana dalam setiap pergerakannya akan terselip agenda politik kekuasaan tertentu dan tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok ekstrem. Dalam kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, isu agama yang diradikalisasi digunakan untuk menjegal Ahok dari bursa kandidat calon Gubernur DKI Jakarta dengan alasan

bahwa ia seorang “kristen” tidak layak memimpin Jakarta yang mayoritas muslim. Apabila fenomena ini tidak dikelola dengan bijak maka akan berpotensi menimbulkan kekerasan aktivisme agama yang berkaitan dengan religious-politic.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui apakah radikalisme isu agama dapat digunakan didalam proses politik, terutama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat berbasis keagamaan. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana praktek radikalisme dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dan Apakah isu radikalisme merupakan strategi untuk memenangkan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ; Pilkada, Gerakan sosial, Teori Tindakan Sosial dan Radikalisme, penjelasannya adalah sebagai berikut :

Pilkada

Menurut Suharizal, dalam bukunya *Pemilukada : Regulasi, Dinamika dan konsep Mendatang*, Pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit dan kehadak politik, kepentingan pusat dan daerah, bahkan kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi Pilkada adalah Pemilihan Umum, dimana secara procedural dan substansial adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakkan kedaulatan, maka Pilkada sebagaimana Pemilihan Umum layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga deraja akuntabilitasnya dan kualitas demokratisnya dapat terpenuhi dengan baik. Landasan hukum Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Perubahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada langsung merupakan kelanjutandari institusional arrangement menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi lokal. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat akan mendapatkan dukungan yang lebih nyata dari rakyat sebagai bentuk kontrak antara pemilih dan pemimpin.

Gerakan Sosial

Orang-orang mulai menyadari bahwa suara satu orang (misalnya dalam pemilihan umum) sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjdai suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan kelompok ini ialah mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Kelompok-kelompok ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial (Social Movements).

Menurut T.Tarrow dalam bukunya *power in movement, Social Movements* adalah tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas, (yang dilaksanakan) melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elite, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat (*Social movements are collective challenges by people with common purpose and solidarity in sustained interaction with elites, opponents and authorities*). Pada tahun 1960-an timbul fenomena baru, sebagai lanjutan dari gerakan sosial lama, gerakan sosial baru (*new social movements*) gerakan sosial baru ini berkembang menjadi gerakan yang sangat dinamis terutama dengan timbulnya pergolakan di negara-negara Eropa Timur yang ingin melepaskan diri dari otoritarianisme menuju demokrasi.

Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa “terasingkan” dari masyarakat. Mereka menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisai pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat (self help), terutama masyarakat lokal.

Radikalisme

Radikalisme merupakan suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform. Berdasarkan telaah arti, radikalisme sesungguhnya merupakan konsep yang netral. Karena perubahan yang bersifat radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif. Makna

radikalisme tidak tunggal, melainkan bergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemikiran atau gagasan, radikalisme bukan merupakan kekerasan. Radikalisme sebagai ideologi politik yang mengusung nilai-nilai intoleran, sektarian dapat mengambil bentuk gerakan yang berbasis keagamaan maupun anti-keagamaan. Apapun bentuk gerakan itu, ruang untuk mewujudkan cita-cita yang diperjuangkannya sama sekali tak ditoleransi oleh Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dasar negara, sering dimanfaatkan oleh para pengusung radikalisme karena watak dasar Pancasila yang merangkum semua kekuatan politik untuk eksis di bawah naungannya. Apa yang terefleksikan pada nilai-nilai yang dikandung pancasila adalah manifestasi dari cita-cita kemanusiaan universal inklusif yang mengendap di jiwa rakyat dan yang diekspresikan oleh para tokoh bangsa yang merintis kelahiran indonesia sejak awal.

Dalam sejarah umat manusia, termasuk umat muslim, radikalisme selalu muncul dalam pemikiran maupun gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah. Orang yang memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak menerima pemikiran lain, selain yang dimilikinya. Otoritas pengetahuan yang dimilikinya dikaitkan dan diperoleh dari figur tertentu yang dinilai tidak dimiliki oleh orang lain. Maka, orang-orang yang memiliki pemikiran radikal tidak menerima figur lain sebagai rujukan pengetahuannya. Prinsip orang yang memiliki pemikiran radikal adalah “melihat orang yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan.”

Radikalisme terdapat juga dalam tindakan dan gerakan yang ditandai oleh aksi ekstrem yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak. Orang yang memiliki pemikiran radikalisme lebih reaktif terhadap persoalan yang dihadapi dan melakukan kekerasan dalam menjawab persoalan. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok radikal didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakini. Gerakan radikal memiliki tujuan mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang mereka citakan.

Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu yang bersifat subjektif yang diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dilakukan oleh individu dengan pertimbangan interpretatif atas situasi, intraksi, dan hubungan sosial yang dikaitkan dengan prefensi nilai, kepercayaan, minat, emosi, kekuasaan, otoritas, kultur, kesepakatan, ide, kebiasaan, atau lainnya yang dimiliki oleh individu.

Weber membedakan tindakan sosial menjadi 4 tipe, yakni :

- A. Tindakan rasionalitas instrumental (berorientasi tujuan) Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan dengan pertimbangan rasional.
- B. Tindakan rasional nilai (berorientasi nilai/berdasarkan nilai) Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuantujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai etika, adat maupun nilai lainnya.
- C. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual. Tindakan afektif sifatnya spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.
- D. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan. Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang.

Praktek Radikalisme Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

A. Penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) merupakan pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan golongan. Isu SARA selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia, terlebih pada saat menjelang Pemilu. Kampanye isu SARA kerap muncul pada saat menjelang pemilu dan berpotensi menimbulkan konflik, pada dasarnya isu SARA digunakan untuk menyerang lawan, bersifat menekan dan menurunkan elektabilitas calon tertentu.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu isu yang muncul lebih mengarah kepada Isu SARA dan Politisasi Identitas yang mana tidak mengedepankan rasionalitas. Isu SARA pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu sangat merugikan pihak pasangan calon petahan dimana Ahok diadili atas tuduhan penistaan agama dan menguntungkan pasangan calon Anies-Sandi yang mengalami peningkatan suara yang signifikan. Kendatipun ketua tim sukses Anies-Sandi, Mardani Ali Sera berpendapat bahwa timnya tidak menggunakan isu SARA sebagai komoditas kampanye akan tetapi timnya sangat diuntungkan karena isu tersebut pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu isu SARA ini didukung oleh sebuah momentum dan collective value behavior sehingga isu SARA ini tidak hanya berkembang pada masyarakat Jakarta saja namun juga masyarakat di luar Jakarta ikut “terlibat”. Kemunculan isu SARA pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, dipicu oleh perkataan Ahok tentang surat Al – Maidah ayat 51 yakni “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, Ayat tersebut melarang orang-orang beriman mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka”. Hal tersebut secara tidak langsung dikategorikan melakukan penistaan terhadap agama Islam. Melihat dampak dan kontroversial dari pernyataan Ahok, membuktikan bahwa isu SARA dan agama mudah untuk ditarik ke ranah politik melihat gencarnya isu SARA digunakan ketika mendekati hari pemilihan. Di Indonesia isu Suku Agama Ras dan Antargolongan dan hal-hal yang berhubungan dengan agama memiliki daya tarik lebih untuk dijadikan komoditas untuk menggiring opini masyarakat, ditambah dengan kondisi dimana meningkatnya emotional investment yang menciptakan sentiment terhadap Ahok dan maraknya aksi-aksi yang mengarah pada penebaran ujaran kebencian yang berdampak destruktif bagi kondisi sosial masyarakat.

Penggunaan isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) menjadi isu yang paling sering digunakan pada Pemilu di Indonesia, karena isu Suku Agama Ras Antargolongan yang digunakan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu secara tidak langsung berhasil menurunkan legitimasi salah satu paslon yang juga terjadi pada pola kampanye Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 lalu.

Tabel 1 Jumlah Spanduk Provokatif

No	Jenis Spanduk	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Timur	Jakarta Selatan	Jakarta Utara	Kep. Seribu	Total
1	Spanduk Provokatif	351	5	93	179	93	21	776
2	Spanduk Tidak Sesuai Aturan	394	49	972	172	276	44	1.882
jumlah		745	54	1.065	281	119	65	2.658

Sumber : Bawaslu DKI Jakarta

Maraknya spanduk provokatif disejumlah titik di daerah Jakarta menimbulkan ketakutan dan mengganggu kebebasan kepada pemilih. Selain spanduk provokatif, yang juga marak terjadi adalah aksi penolakan dan penghadangan atas kegiatan kampanye di beberapa daerah di Jakarta. Ini

membuktikan bahwa terlepas dari kasus Ahok, tidak dibutuhkan orang baik tetapi harus se-iman dalam memimpin

B. Politisasi Identitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Politisasi identitas yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 diawali dari politisasi ayat, dimana terdapat pemotongan hadist untuk mengobarkan permusuhan. Menurut Agnes Heller, politik identitas adalah gerakan politik yang ada dalam setiap komunitas, walaupun berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak dapat dipungkiri bahwa didalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing¹. Dengan demikian Politik Identitas dapat dijelaskan sebagai situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan atas hasil tindakan represi yang memarginalkan sebuah kelompok di masa lalu. Identitas dapat berubah menjadi politik identitas apabila basis perjuangannya adalah basis perjuangan kelompok². Dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu tindakan politik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, gender, budaya dan agama untuk mewujudkan kepentingan politiknya. Hal ini sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan dengan maraknya aksi massa, kampanye di tempat ibadah dan beberapa intimidasi yang menyinggung isu SARA ditingkat akar rumput selama rangkaian Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menguatnya politik identitas terjadi semenjak terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu terdapat kekuatan yang mendasari pada politisasi identitas sebagai cara untuk merebut kekuasaan, terdapat kelompok-kelompok non-parlemen yang mendorong isu politik identitas dan menengarai kepada identitas islam. Menguatnya isu Politik Identitas di Pilkada Jakarta 2017 dipicu oleh video pidato Ahok dihadapan sejumlah warga dan nelayan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 30 September 2016. Ahok menyinggung salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 51 yaitu “jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51”. Politisasi identitas selama Pilkada DKI Jakarta berperan dan punya andil dalam menciptakan sikap intoleransi dikalangan masyarakat. Aksi massa yang terus dilakukan selama Pilkada, maraknya khutbah bermuatan politik dan bersifat intoleransi berujung pada tumbuh kembangnya pandangan radikalisme dimasyarakat.

Radikalisme Sebagai Strategi Memenangkan Pasang Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

A. Sentimen Agama

Isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) seputar Pilgub DKI Jakarta sudah mulai nampak dalam respons masyarakat di berbagai media, khususnya media sosial. Isu isu yang dikembangkan menjadi peluru untuk menjatuhkan Ahok antara lain soal larangan bagi Muslim dalam memilih pemimpin kafir dan bahaya dominasi etnis Tionghoa di Jakarta. Serangan balik yang dilakukan Ahok terhadap isu rasisme yang mengarah kepadanya justru mempertajam friksi. Ujaran Ahok di Kepulauan Seribu kemudian menjadi viral di dunia maya dan sontak menuai reaksi publik. Pada tanggal 7 oktober 2016, Ahok dilaporkan kepada polisi atas dugaan melakukan tindak pidana penghinaan agama. Reaksi kelompok-kelompok Islam atas dugaan penistaan agama oleh Ahok semakin intensif dan meluas. Dari peristiwa friksi politik seputar Pilgub DKI Jakarta 2017 yang melibatkan isu agama, kita dapat melihat bagaimana kelompok-kelompok Islam dapat bergerak secara massif dan intensif. Hal yang tidak dapat dipungkiri dalam peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana kontestasi pemilu yang bersinggungan dengan isu keagamaan, atau sebaliknya, telah membawa dampak yang signifikan terhadap persepsi keamanan nasional. Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu mengalami situasi politik yang berlangsung bersamaan, berawal dari persoalan hukum dimana petahana dilaporkan oleh pihak tertentu berkaitan dengan penistaan agama, pertarungan tiga pasangan calon dan partai ataupun tokoh yang berada dibalik masing-masing pasangan calon, dan persoalan agama dalam Pemilu. Adanya hegemoni atau penindasan simbolik yang dirasakan oleh masyarakat

¹ Agnes Heller, *An Ethnic of Personality*, Blackwell, 2006, hlm. 53.

² Zainan Abidin Bagir, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keagamaan Indonesia*, CRCs, 2011, hlm 18.

Masyarakat betawi yang merasa tersisihkan. Pada Oktober 2016, Forum Betawi Rempug (FPR) yang merupakan organisasi masyarakat berbasis kesukuan menolak pasangan Ahok-Djarot dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 karena menganggap Ahok sebagai orang fasis, arogan dan pendendam. Hubungan Forum Betawi Rempug dan Ahok sudah panas semenjak Ahok diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Forum Betawi Rempug merupakan salah satu organisasi masyarakat yang ikut serta membentuk Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah (MTJB) bersama Front Pembela Islam (FPI) untuk menantang Ahok. Forum Betawi Rempug dalam menolak Ahok dengan ikut berbagai Aksi Bela Islam

Apabila melihat dari teori tindakan sosial Max Weber, konservatifisme pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu muncul akibat ketidaksukaan terhadap sikap dan perilaku Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat konservatifisme dengan menolak non-islam dan non-pribumi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan tindakan rasional nilai dengan berorientasi pada nilai-nilai kultur. Kendatipun konservatifisme yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu tidaklah bersifat permanen melainkan sementara. Isu konservatifisme tersebut digunakan karena ada kesamaan kepentingan.

Isu konservatifisme di Jakarta pada Pilgub 2017 lalu memang terjadi dan terdapat aktor yang menggunakan isu tersebut untuk menjatuhkan pasangan calon Ahok-Djarot dengan istilah triple minority (China, Kristen dan bukan orang betawi) dan terdapat politisi yang memanfaatkan efek dari penggunaan isu konservatifisme yang masif di masyarakat. Jika melihat kondisi empirik pada saat itu selain Ahok-Djarot, politisi yang berlaga pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua adalah Anies-Sandiaga. Secara tidak langsung pasangan calon Anies-Sandiaga sendiri memanfaatkan dampak dari ketidaksukaan mayoritas masyarakat terhadap Ahok, didukung dengan kelompok-kelompok keagamaan dan kesukuan seperti Front Pembela Islam dan Forum Betawi Rempug yang sangat konservatif dan merupakan kelompok resisten terhadap Ahok. Kendatipun mereka bukan aktor utama tetapi peran mereka dalam menyerukan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim dan bukan orang betawi sangat besar. Saat penetapan putaran kedua, masyarakat Jakarta yang telah kecewa terhadap Ahok harus memutuskan pilihan kepada Anies karena situasi pada saat itu seruan yang beredar adalah untuk tidak memilih Ahok. Pengaruh sentimen agama dan konservatifisme pada Pilgub DKI Jakarta 2017 sangat besar karena hampir 83% pemilih merupakan pemilih muslim yang masih memegang nilai-nilai kultur atau relasi sosial didaerahnya. Namun sikap konservatifisme ini tidaklah permanen, melainkan bersifat temporer karena dipicu oleh permasalahan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang masif terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Radikalisasi Isu Agama Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Secara institusional pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu berjalan dengan lancar tanpa adanya tahapan yang terganggu. Tetapi, apabila melihat dengan kaca mata post-modernis terdapat kejanggalan dalam perilaku masyarakat Jakarta. Post-modernis dalam memandang fenomena politik melihat dari simbol-simbolnya. Anjuran-anjuran yang bersifat menghasut, ajakan-ajakan yang bersifat negatif sangat terasa selama Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Anjuran-anjuran untuk tidak memilih pemimpin *kafir*/ non-muslim benar terjadi dimasyarakat. Anjuran-anjuran, spanduk-spanduk provokatif dan khotbah jum'at dimesjid yang memiliki muatan politik merupakan simbol-simbol persoalan sentimen agama yang terjadi dan menunjukkan bahwa terdapat nuansa membawa unsur keagamaan dalam Pilkada.

Fenomena yang terjadi pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 menciptakan stigma yang bersifat negatif yang terafiliasi dengan pandangan radikalisme. Hal ini dipicu oleh berkembangnya isu SARA dan Politisasi identitas yang menjadi komoditas utama dalam kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Radikalisme dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 dipengaruhi oleh masifnya penggunaan isu agama sebagai komoditas kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini telah merusak nilai-nilai toleransi antar masyarakat dan menimbulkan konflik dikarenakan berbeda pilihan politik. Isu agama

memiliki sifat yang eksploif dan dapat menimbulkan dampak destruktif yang masif antar individu. Munculnya kesalahan yang diawali oleh Ahok dalam Pidatonya di Kep. Seribu yang menyinggung surat Al-maidah ayat 51 “*dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, Ayat tersebut melarang orang-orang beriman mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka*” menjadi pemicu awal atau titik kesalahan utama yang menimbulkan propaganda-propaganda isu SARA yang berujung pada radikalisme. Apa yang telah dilakukan oleh Ahok dalam pidatonya tersebut merupakan kesalahan dengan menyentuh sesuatu yang sakral dalam Islam. Konflik SARA yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 memang tidak dapat dihindari, didukung banyak munculnya berita-berita yang tidak valid beredar dalam media sosial. Media sosial merupakan media yang dapat diakses semua orang dan tidak dapat dikendalikan. Tidak semua orang memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Akan lebih baik jika dalam pilkada lebih mengedepankan tentang visi dan misi para calon kandidat. Jikalau pemilih melihat dari segi agama atau etnis tidak dilarang. Namun sangat tidak dianjurkan untuk memaksakan memilih sebuah kandidat dengan mengancam jika meninggal tidak akan disholatkan. Karena dengan mengancam sama juga membuntungkan kebebasan dalam berpendapat. Karena sesungguhnya yang masyarakat butuhkan adalah kinerja dari pasangan calon bukan dari etnis maupun agamanya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang penulis berikan terkait dengan penanggulangan radikalisasi isu agama dalam Pilkada maupun Pemilu di Indonesia. *Pertama*, kepada pemerintah dan lembaga yang penyelenggara pemilu harus membuat langkah prevensi in optima forma yang dituangkan dalam regulasi dan peraturan Pilkada yang tegas agar bangunan demokrasi kita tidak semakin dicemari oleh pihak-pihak yang berpikiran politik sumbu pendek. Sebab, pihak-pihak ini akan terus memunculkan narasi SARA sehingga kampanye politik tidak lagi mengedepankan adu gagasan dan program kerja. *Kedua*, kepada kandidat yang ingin mengikuti kontestasi politik, dalam politik jangan melibatkan agama dalam berkampanye, karena mengajak masyarakat untuk memilih berdasarkan agama akan menimbulkan masalah begitu pula sebaliknya, mengajak masyarakat berdasarkan Pancasila juga dapat menimbulkan masalah, yang perlu ditekankan adalah bagaimana memenangkan hati masyarakat tanpa harus memunculkan konflik di masyarakat. *Ketiga* kepada masyarakat agar setiap pelaksanaan Pemilu hendaknya dilaksanakan secara dewasa dan menggunakan nalar tidak dengan sikap *absolute truth claim* yang dapat menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak muncul anggapan bahwa apabila anda pro Pancasila maka akan kontra Islam dan apabila pro Islam maka anda tidak berpancasila. Pilkada sebagai ajang memilih pemimpin hendaknya disikapi dengan bijak agar tidak mengorbankan keutuhan NKRI.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Masyarakat dan Pemerintah daerah maupun nasional untuk terus meningkatkan intergritas dalam menegakan demokrasi di Indonesia, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
Maarif, Ahmad Syafii. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.

- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Subakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta : Rajawali Press.
- Arifin, Syamsul dan Hasnan Bachtiar. 2013. *Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnasional Radikal*. Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol.12.
- Fadly, M. Ahyar. 2016. *Gerakan Radikalisme Agama; Perspektif Ilmu Sosial*. Vol IX No. 1
- Hermansyah. 2017. *RADIKALISME Tafsiran Atas Sebuah Isme*.

Daftar Narasumber

- Muhammad Jufri - Ketua Bawaslu DKI Jakarta
- Andi Maulana - Biro HPP Bawaslu DKI Jakarta
- Dimas Ramadhan - Pengamat Politik dari Populi Center
- Gunawan Hartono – Pengamat Politik dari Populi Center
- Hendardi - Pengamat Politik dari Setara Institute.

Tentang Penulis

Fariz Mahadhika Putra adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.